

## **OPTIMALISASI KINERJA PINJAMAN BERGULIR BLM PNPM-MP TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI KOTA SURABAYA**

### **Siti Mujanah**

Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya  
Email: siti\_mujanah2003@yahoo.com

### **Informasi Artikel**

#### *Riwayat Artikel*

Diterima tanggal 01 Maret 2015

Direvisi tanggal 15 Maret 2015

Disetujui tanggal 23 April 2015

#### *Klasifikasi JEL*

N35

#### *Kata Kunci*

Bantuan Dana kepada Komunitas  
Program Nasional Pemberdayaan  
Masyarakat  
Usaha Mikro dan Kecil  
Kesejahteraan Keluarga

#### *DOI*

10.17970/jrem.15.150102.ID

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the extent of Direct Funding Assistance to Community (BLM) through National Program of Community Empowerment-Independent Urban (PNPM-Mandiri Perkotaan) affected to the increased well-being of poor families in the city of Surabaya, so the results of this study are expected to know whether this program can be continues as poverty alleviation programs in Indonesia in the future or not. The techniques of data collection used in this study was survey and questionnaire used as instrument given to the sample of the population which received BLM PNPM-MP in Surabaya, and data were analyzed by descriptive method. The research finding showed that the Revolving funds have been distributed to the community through PNPM in Surabaya to revive economic activity through micro small business that has been very beneficial for economic activities so that they have no longer funding from money landers to fulfill the financial needs for funding their business progress, and they were able to increased their business until 20-30%, and it was impact on household well-being about 10 s/d 30%. This indicate that the Funding Assistance could resolved the families financial difficulties, and improved their own business, the quality of their family's food, and there was also able to save money for their family purpose.

### **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya pengaruh Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bagi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di Surabaya. Di samping itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program tersebut dapat dilanjutkan sebagai program mengentas kemiskinan di Indonesia di waktu yang akan datang. Teknik pengumpulan data melalui survey dengan menggunakan kuisisioner digunakan dalam penelitian ini. Sampel dari populasi yang memperoleh BLM PNPM di Surabaya serta dianalisa dengan metode deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa dana bergulir yang didistribusikan kepada komunitas untuk menghidupkan kembali aktivitas perekonomian melalui usaha mikro dan kecil sangat bermanfaat bagi kegiatan perekonomian, sehingga masyarakat tidak melakukan pinjaman ke rentenir. Di samping itu kegiatan

usahanya meningkat sampai dengan 20-30% serta meningkatkan kesejahteraan rumah tangga 10-30%. Hal ini menunjukkan bahwa Bantuan Langsung Masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan kesulitan keuangan masyarakat, serta meningkatkan usaha mereka, kualitas makanan keluarga serta juga meningkatkan tabungan keluarga.

## 1. PENDAHULUAN

Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Menurut BPS, pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (11,37 %), berkurang sebesar 0,52 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 28,59 juta orang (11,66 %). Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk menanggulangnya. Menurut Program Tim Nasional Tnp2k, pemerintah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut antara lain merupakan program yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Walaupun demikian, program-program pemberdayaan masyarakat yang ada selama ini dianggap kurang mampu mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemberdayaan lebih banyak dikaitkan dengan program pemberian bantuan yang kurang menimbulkan keswadayaan masyarakat local. Kondisi yang demikian berarti program pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan tidak berjalan dengan efektif. Terbukti dengan anggaran yang semakin besar, namun angka kemiskinan pun masih cukup besar (seharusnya berkurang). Ini berarti ada sesuatu yang belum tepat dalam program pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan satu diantara usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Sejak tahun 2007, program ini sudah berkembang pesat dengan komponen terbesarnya yaitu PNPM Mandiri. Tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk merancang dan menyetujui agenda pembangunan mereka sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, kerangka program yang partisipatif dan transparan juga membantu meningkatkan tata pemerintahan daerah.

PNPM Mandiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu perkotaan dan perdesaan. *Leading sector* program perkotaan ditangani Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum (PU) sedangkan program perdesaan ditangani Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Program ini memiliki tiga target, yaitu pengelolaan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Program di bidang sosial misalnya menyantuni warga jompo, bidang ekonomi memberikan bantuan modal bergulir, dan bidang lingkungan melakukan pembangunan infrastruktur

Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, diharapkan dapat menjadi tolok ukur pencapaian target proyek PNPM. Dengan melaksanakan program PNPM Mandiri, diharapkan masyarakat semakin mampu untuk mendapatkan pangan yang lebih baik, bersekolah lebih lama, mendapatkan pekerjaan dan mendirikan usaha, menerima perawatan kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang indah dan nyaman. Namun, pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, terutama dalam bidang pengelolaan ekonomi. Dana yang disalurkan pada kegiatan ekonomi produktif belum bisa berjalan dengan lancar sehingga perguliran dana menjadi tersendat. Oleh karena itu, perlu diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan program PNPM Mandiri yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kota Surabaya.

## 2. RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

### 2.1. Konsep Pemberdayaan

Menurut Ife (1995:56, dalam K. Suhendra, p. 77) pemberdayaan adalah kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung “*Empowennent aims to increase the power of disadvantage*”. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus-menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self development*). Pemberdayaan ini harus berawal dari kemauan politik (*Political will*) para penguasa (Reonard D., White, dalam Suhendra, 1998, p.2). Apabila proses politik berakhir maka proses administrasi dimulai.

Berdasarkan hasil karya dan pikiran para ahli pemberdayaan, dapat diketahui empat dimensi (Suhendra,p.81-86), yaitu: konsep, proses, tujuan, dan indikator.

#### a. Dimensi Konsep

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep yang mulia karena menghargai harkat dan martabat manusia yang merupakan suatu cita yang idealis, suatu *das sollen*. Mereka berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat analog dengan konsep demokrasi dan kesejahteraan sosial serta kedaulatan rakyat. Apabila pemberdayaan masyarakat tercipta dalam suatu masyarakat, maka akan terbentuk sinergis berbagai komponen bangsa baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Hal tersebut akan menciptakan suatu keadaan yang harmonis, aman dan sejahtera.

#### b. Dimensi Proses

Untuk mencapai situasi dan kondisi pemberdayaan masyarakat, termasuk di bidang ekonominya, diperlukan proses yang lama dengan berbagai peluang disertai permasalahan dan kendala yang perlu diselesaikan. Indonesia telah mengenal dan memperjuangkan pemberdayaan masyarakat ini dalam berbagai istilah, yaitu *people empowerment*, *people centered development*, demokrasi, kesejahteraan sosial

kedaulatan rakyat, masyarakat madani (*civil society*). Namun, hingga saat ini belum tercipta sebagaimana yang diharapkan.

#### c. Dimensi Tujuan

Pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan yang berciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Demokrasi
- 2) Kesejahteraan masyarakat dengan pemerintah
- 3) Kebebasan berbicara
- 4) Kebebasan berkegiatan
- 5) Hak untuk merencanakan
- 6) Hak untuk mengelola asset local
- 7) Hak untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan
- 8) Hak untuk menikmati jerih payah sebagai buah dari pembangunan

#### d. Dimensi Indikator

Keberhasilan untuk membentuk pemberdayaan masyarakat dapat diukur dari kesenjangan yang terjadi pada indikatornya. Apabila kesenjangan-nya besar, ini berarti pemberdayaan masyarakatnya tidak berjalan. Bila kesenjangan-nya kecil, maka upaya pemberdayaan masyarakatnya relatif berhasil. Indikator masyarakat yang berdaya adalah

- 1) mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada dimasyarakat.
- 2) *bottom up planning* dapat berjalan
- 3) kemampuan dan aktivitas ekonomi
- 4) kemampuan menyiapkan lahan depan keluarga
- 5) kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa tekanan

Indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat yang mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mengawasi proses pembangunan dan juga dapat menikmati hasil pembangunan. Adapun unsur-unsur pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. Kemauan politik yang mendukung
- b. Suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh
- c. Motivasi
- d. Potensi Masyarakat
- e. Peluang yang tersedia
- f. Kerelaan mengalihkan wewenang
- g. Perlindungan
- h. *Awareness*

## 2.2. Metode dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat

Karakteristik pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dikemukakan dengan beberapa teknik pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai berikut.

### a. *Participatory Rural Appraisal*

*Participatory Rural Appraisal* adalah pengkajian desa secara partisipatif. Tapi, dalam praktiknya dapat pula dilakukan untuk wilayah kota/urban. Dengan demikian, teknik ini lebih bersifat pengkajian masyarakat secara partisipatif, yaitu pendekatan dan teknik-teknik pelibatan masyarakat dalam proses-proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan perencanaan dan pelaksanaan; serta pemantauan dan evaluasi program pembangunan masyarakat, Driyamedia (dalam Suhendra, 2006:105).

### b. Metode *Partisipasi Assesment dan Rancangan*

Metode ini didapat dari dua sumber, yaitu *Field Book WSLIC-2 Proyect World Bank* dan *Participatory Analysis Technique DFID-World Bank* Januari 2002, Bambang Rustanto (dalam Suhendra, 2006:108—109).

### c. Metode Loka karya

Metode loka karya efektif dalam memotivasi anggota peserta untuk menyampaikan aspirasi dan kreativitas. Manfaatnya adalah mengambil keputusan fokus permasalahan secara musyawarah dan didapatkan suatu konsensus. Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Agenda yang dibahas sesuai kebutuhan peserta.
- 2) Sebaiknya membagikan *hand out* topik yang akan dibahas beberapa hari sebelumnya.
- 3) Semua gagasan ditampung dan dikembangkan, jumlah kelompok
- 4) sebaiknya relatif kecil 5-10 orang.
- 5) Hasil rumusan yang telah dicapai dalam setiap kelompok dipresentasikan dalam pleno.
- 6) Dalam pleno diadakan sharing yang diwakili juru bicara dan didapatkan konsensus.

### d. Teknik *Brainstroming*

Teknik *Brainstroming* memunculkan kreativitas dengan memotivasi anggota untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Teknik ini merupakan wujud dari "*Botton Up*" sehingga memunculkan rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab. Secara operasional, teknik *Brainstroming* ini adalah sebagai berikut.

- 1) Kurang lebih 10 orang dikumpulkan; fokus yang akan dibahas diajukan.
- 2) Gagasan secara bebas dan bertanggung jawab dapat diajukan setiap peserta.
- 3) Satu orang bertugas sebagai sekretaris yang selalu mencatat inti pembicaraan.
- 4) Disampaikan resume dan refleksi kepada peserta.
- 5) Konsensus alternatif ditemukan lalu keputusan diambil.

### e. *Community Organization and Community Development*

*Community Organization* merupakan suatu proses untuk mewujudkan dan membina suatu penyesuaian yang efektif diantara sumber-sumber kesejahteraan sosial dan kebutuhan kesejahteraan sosial lingkungan suatu daerah geografis. Menurut C.F.Mc. Neil (dalam Soetarso, 1994:11, dalam Suhendra, 2006:112), tujuannya difokuskan pada kebutuhan orang serta penyediaan sarana dengan cara yang sesuai dengan



dasar kehidupan demokrasi). Penerapan teknik ini tidak hanya terbatas dalam masalah kesejahteraan sosial, tetapi juga kesektor lain, seperti pendidikan, pertanian, agama, dan lain-lain.

Sejalan dengan *Community Organization*, dalam *Community Development* ini juga berupaya memajukan kesatuan masyarakat. Teknik ini dipakai dalam upaya memperbaiki kondisi masyarakat yang kekurangan kebutuhan primer dasar, baik materil maupun non materil. Menurut Sutarso (dalam Suhendra, 2006:113), Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan definisi “*Community Development*” merujuk berbagai pendekatan dan teknik dalam suatu program tertentu pada masyarakat lokal sebagai kesatuan tindakan. Selain itu, mengusahakan perpaduan antara bantuan yang berasal dari luar dengan keputusan dan upaya masyarakat lokal yang diorganisasi. Program ini dimaksudkan untuk mendorong prakarsa dan kepemimpinan lokal sebagai sarana perubahan primer.

## **2.2. Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM**

Program pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi kemiskinan baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Satu diantara program tersebut adalah PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Program ini dilakukan dengan bekerjasama dengan *World Bank* dan *Asean Development Bank* (ADB). Walaupun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih sulit mendapatkan kebutuhan dan pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat di Kota Surabaya telah dilakukan, antara lain adalah program PNPM Mandiri Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan

secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin; efisiensi dan efektivitas kegiatan; serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

### **2.2.1. Pemahaman tentang PNPM – Mandiri Perkotaan**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah Indonesia menciptakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri, dirumuskan mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dikembangkan. Dengan demikian, masyarakat miskin tersebut bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dilakukan untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Tahun 2008, program ini diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah seki-

tarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan.

Ada dua macam pelaksanaan PNPM – Mandiri, yaitu PNPM-Mandiri Perdesaan dan PNPM- Mandiri Perkotaan. Pembahasan dalam kajian ini adalah PNPM-Mandiri Perkotaan (PNPM – MP)

#### **a. Pengertian**

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan, terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung dalam PNPM Mandiri adalah sebagai berikut.

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program; penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

#### **b. Tujuan**

PNPM Mandiri secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Den-

gan demikian, secara khusus tujuan PNPM Mandiri Perkotaan dirumuskan bahwa “masyarakat di kelurahan, peserta program menikmati perbaikan sosial, ekonomi, dan tata pemerintahan lokal”.

#### **c. Sasaran**

1. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang dipercaya, aspiratif, representatif, dan akuntabel dapat mendorong pertumbuhan dan berkembang partisipasi serta kemandirian masyarakat.
2. Ketersediaan Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi semua kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan lingkungan pemukiman sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan
3. Keberadaan forum LKM tingkat kecamatan dan kota/kabupaten mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah.
4. Terwujudnya kontribusi pendanaan dari pemerintah Kota/Kabupaten dalam PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

#### **2.2.2. Manajemen Program PNPM-MP**

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari PNPM Mandiri. Oleh sebab itu, pengelolaan program ini juga merupakan bagian dari pengelolaan program nasional PNPM Mandiri yang telah diatur dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang diterbitkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri.

Organisasi penyelenggaraan yang diuraikan dalam hal ini adalah khusus organisasi penyelenggaraan PNPM Mandiri Perkotaan yang secara struktur organisasi berada di bawah ken-

dali Tim Pengendali PNPM Mandiri Nasional. Untuk menyelenggarakan program PNPM-MP ini, Departemen Pekerjaan Umum sebagai lembaga penyelenggara (*executing agency*) menugasi Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk menyelenggarakan PNPM-MP.

Direktorat Jenderal Cipta Karya membentuk Unit Manajemen Proyek yang dikenal sebagai PMU (*Project Management Unit*). PMU dipimpin oleh seorang Kepala Unit dan mendapat mandat penuh serta bertanggung jawab kepada Dirjen Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PNPM-MP. Dalam pelaksanaannya dilapangan, PMU melalui Satker mengontrak Konsultan Manajemen Pusat (KMP). KMP akan bertindak atas nama PMU sesuai dengan kewenangan yang diberikan PMU, untuk melakukan manajemen proyek secara menyeluruh. Termasuk manajemen Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) yang akan bertugas di beberapa provinsi yang membawahi beberapa *Team Leader* sesuai jumlah provinsi damingannya dan dipimpin oleh seorang *Program Director*. Begitu juga pelaksanaan di tiap kota dan kabupaten, dipimpin oleh seorang Korkot (Koordinator Kota) yang berkantor di kota/kabupaten bersangkutan dibantu beberapa tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Di tingkat kelurahan, tiap tujuh sampai dengan sepuluh kelurahan akan didampingi oleh Tim Fasilitator. Tim Fasilitator ini akan dikontrak oleh Satker Provinsi yang dalam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Korkot. Selain itu, tiap kelurahan, warga masyarakat didorong untuk memilih para relawan (minimal 30 orang per kelurahan). Melalui suatu pelatihan secara khusus oleh KMW, para relawan ini akan menjadi Kader Masyarakat PNPM-MP yang akan berperan sebagai agen pembangunan. Selain itu, mereka juga akan bekerja sama dengan warga sebagai relawan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di kelurahan masing-masing, terutama warga miskin dan kelompok masyarakat rentan lainnya.

### 2.3. Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan sulit didefinisikan dan diukur. Secara umum, ukuran kesejahteraan diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni objektif dan subjektif. Kategori pertama mengukur kesejahteraan melalui fakta-fakta tertentu yang dapat diamati seperti ekonomi, sosial dan statistik lingkungan.

Kesejahteraan diukur secara tidak langsung menggunakan ukuran ordinal. Menurut Rojas (2004) kurang tepat bila menilai kesejahteraan hanya berdasarkan pendapatan dan indikator sosial ekonomi lainnya. Kesejahteraan manusia bergantung pada banyak faktor di luar standar hidup yang biasa seperti pendapatan, konsumsi, kekayaan, posisi sosial-ekonomi dan akses terhadap pelayanan umum. Dengan demikian, pendapatan harus dipertimbangkan sebagai satu dari banyak alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan. Pendapatan dan variabel sosial-ekonomi lain dapat menjadi variabel penjelas yang nyata, dan proksi yang baik dari kesejahteraan bagi sebagian orang.

Ukuran subjektif dari kesejahteraan menangkap perasaan hati pengalaman riil seseorang dengan cara langsung, dan menilai kesejahteraan melalui pengukuran (McGillivray & Clarke 2006; van Hoorn 2007 dalam Conceição & Bandura 2008), yang menyatakan bahwa "*subjective wellbeing involves a multidimensional evaluation of life, including cognitive judgments of life satisfaction and affective evaluations of emotions and moods*" (Kesejahteraan subjektif merupakan evaluasi multidimensional kehidupan, termasuk penilaian kognitif kepuasan hidup dan evaluasi afektif dari emosi dan mood).

McCall menyatakan bahwa kesejahteraan keluarga dapat diukur melalui pendekatan "*Quality of Life*", yaitu diukur berdasarkan kebutuhan untuk kesenangan seseorang. Selanjutnya, Frank menyatakan bahwa *Quality of Life* mencerminkan perbedaan gap, antara harapan dengan yang dialami sebagai tingkatan seseorang menikmati berbagai kemungkinan

hidupnya sebagai akibat dari pembatasan dan peluang hidupnya dan sebagai cerminan dari interaksi dengan faktor lingkungan (Puspitawati & Megawangi 2003).

Pendekatan untuk mengukur kesejahteraan multidimensional dapat dilakukan melalui ukuran subjektif, mencakup kebahagiaan diri dan kepuasan hidup. Selama beberapa abad, subjek kebahagiaan adalah bidang teologi dan filosofi. Namun, akhir-akhir ini, hal tersebut menjadi penting pada ilmu-ilmu sosial, pertama dalam psikiatri dan sejak tahun 1950 masuk dalam *main stream* ilmu-ilmu sosial dan ekonomi, Easterlin (dalam Conceição&Bandura, 2008).

Beberapa ahli ekonomi menggunakan “kesejahteraan subjektif” sebagai sinonim dari “kebahagiaan”. Namun, dalam psikologi, kebahagiaan konsepnya lebih sempit daripada kesejahteraan subjektif. Bruni dan Porta (dalam Conceição dan Bandura, 2008) menyatakan bahwa kesejahteraan subjektif terdiri atas empat komponen, yakni: 1) emosi yang menyenangkan, 2) emosi yang tidak menyenangkan, 3) penilaian hidup global (evaluasi hidup), dan 4) domain kepuasan (perkawinan, kesehatan, kesenangan, dan lain-lain).

Kebahagiaan dan kepuasan hidup merupakan komponen kesejahteraan subjektif. Kepuasan hidup menggambarkan jarak yang dirasakan seorang individu dari aspirasinya. Kebahagiaan merupakan hasil dari keseimbangan antara pengaruh positif dan negatif. Suatu keluarga, walau tinggal di bawah garis kemiskinan, dapat merasa lebih sejahtera karena merasa lebih bersyukur atas karunia-Nya, merasa semua keinginannya sudah terpenuhi, merasa telah hidup selaras dengan alam, dan alasan lainnya (Syarief & Hartoyo 1993).

#### **2.4. Pengaruh PNPM Mandiri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan dalam partisipasi masyarakat yaitu peran serta masyarakat dalam perencanaan PNPM Mandiri Perde-

saan, peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan peran serta masyarakat dalam pengelola PNPM Mandiri Perdesaan. Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan dalam partisipasi keswadayaan masyarakat berupa partisipasi keswadayaan alat dan tenaga. Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan dalam kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Hasil penelitian (Nuryahman Hartono, 2013) menemukan bahwa dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat miskin dapat meningkatkan pendapatan warga miskin tersebut, program bantuan dana bergulir melalui PNPM-Mandiri terbukti bisa meningkatkan produksi, jumlah tenaga kerja maupun pendapatan yang implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Gita Alfiani Fatria (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan dengan adanya pembiayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan di kecamatan Stabat.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Kegiatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan survei di kelurahan-kelurahan di Kota Surabaya yang mendapatkan Program PNPM Mandiri terutama Bantuan Pinjaman Bergulir BLM.

#### **3.2. Variabel Penelitian**

- a. PNPM – MP adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan



- pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
- b. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
- c. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah Bantuan dana yang diberikan bersifat stimulant bagi masyarakat sesuai dengan apa sudah direncanakan masyarakat dengan memprioritaskan masyarakat miskin untuk kegiatan

produktif yang bersifat kolektif dan menyentuh langsung pada masyarakat miskin.

- d. Kesejahteraan Keluarga dalam kajian ini adalah kondisi keluarga yang cukup yang dalam hal ini dapat dilihat dari pendapatan, konsumsi, kekayaan, posisi sosial-ekonomi dan akses terhadap pelayanan umum Rojas (2004)

### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang terlibat baik mengelola maupun menerima Program BLM PNPM-MP di Kota Surabaya. Sampel dalam penelitian adalah 20 kelurahan dari 160 kelurahan di Kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive*, yaitu mempertimbangkan tingkat kelancaran atau kemacetan pelaksanaan program PNPM-MP di Kota Surabaya, terutama program dana bergulir.

## 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Pinjaman Bermasalah

Distribusi pinjaman KSM dan Prosentase Pinjaman bermasalah dapat dilihat pada Tabel 1

**Tabel 1**  
**Daftar Kecamatan Dengan Resiko Pinjaman Bermasalah**

No.	Kecamatan	Pinjaman KSM	Saldo Pinjm Yg Mengandung Tunggakan > 3 bln	% Pinjaman Bermasalah
1	GAYUNGAN	554,803,806	419,958,806	76%
2	KENJERAN	,918,161,020	587,170,683	31%
3	WONOCOLO	618,315,430	159,236,000	26%
4	ASEMROWO	82,250,000	20,900,000	25%
5	BENOWO	274,651,500	63,576,465	23%
6	BUBUTAN	,152,063,064	261,892,250	23%
7	BULA7K	101,025,000	16,700,000	17%
8	LAKARSANTRI	227,660,000	27,050,000	12%

9	WIYUNG	610,506,644	46,475,250	8%
10	PAKAL	158,783,639	11,371,272	7%
11	KARANGPILANG	948,421,831	65,610,950	7%
12	JAMBANGAN	635,602,000	12,300,000	2%

Sumber Laporan PNPM-Mandiri Faskel Kota Surabaya

Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase terbesar pinjaman bermasalah adalah di Kecamatan Gayungan, yaitu 76% dan kedua adalah Kecamatan Kenjeran (31%), ketiga adalah Wonocolo (26%), keempat Asemrowo (25%), kelima adalah Bubutan dan Asemrowo (23%), kelima adalah Kecamatan Bulak (17%), keenam adalah Lakarsantri (12%), dan persentase terendah adalah Jambangan (2%).

## 4.2. Persepsi Masyarakat Terhadap Dana Bergulir

### 4.2.1. Penerima Pinjaman Bergulir

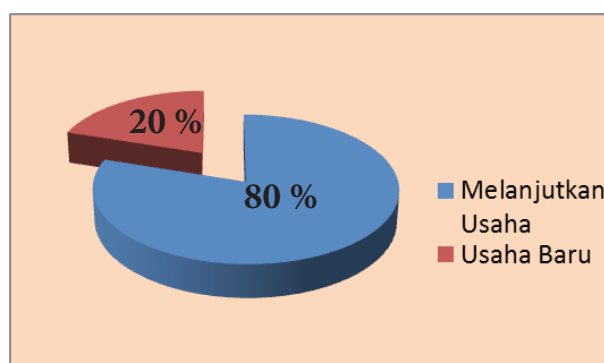
Responden dalam kajian ini adalah UPK (Unit Pengelola Keuangan) dan anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di 20 Kelurahan yang berada di Kota Surabaya. Data hasil wawancara terstruktur terhadap UPK dan KSM menunjukkan bahwa bantuan pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Surabaya telah diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam PNPM MP sesuai dengan Rencana Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan (Renta Pronangkis).

Program pinjaman dana bergulir PNPM diberikan untuk masyarakat miskin di kelurahan-kelurahan Kota Surabaya, sedangkan untuk menentukan masyarakat miskin didasarkan pada data dari BPS Kota Surabaya yang telah dicatat di masing-masing kelurahan dan disepakati oleh masyarakat secara terbuka.

Gambar 1 menunjukkan bahwa sekitar 80% dana yang telah diterima oleh anggota KSM dalam Program Pinjaman Dana Bergulir PNPM MP digunakan untuk melanjutkan usaha yang sudah di milikinya dan hanya sekitar

20% yang digunakan untuk membuka usaha baru atau mengembangkan usaha dibidang yang lain. Kebanyakan usaha mereka bergerak di bidang Pracangan, berjualan di Pasar, menjual gorengan, pembuatan krupuk, berjualan es, bakso, nasibungkus, kue, warung, cuci setrika dan lain-lain.

**Gambar 1. Peruntukan Pinjaman Dana Bergulir**

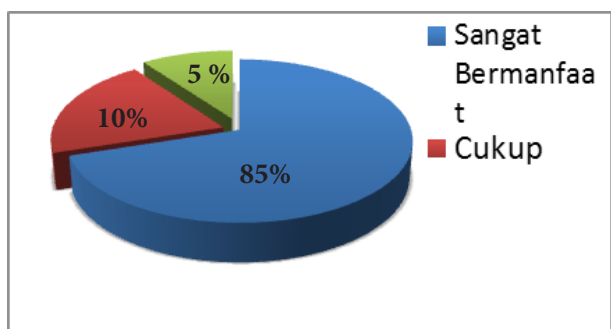


Sumber: Data Primer

### 4.2.2. Sikap Terhadap Program PNPM

Hasil survey membuktikan bahwa sekitar 85% dari responden memiliki sikap positif dan antusias terhadap Program Bantuan Pinjaman bergulir melalui Program PNPM MP dan hal ini telah diakui oleh sekitar 85% responden. Yang mengatakan biasa-biasa saja 10% serta ada yang berniat tidak mau meminjam kembali (5%). Setelah ditanya, alasan masyarakat tidak mau meminjam lagi adalah takut punya hutang dan takut jika ditagih hutang kerumah. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.

**Gambar 2 Sikap Responden Terhadap Program PNPM-MP**



Sumber : Data Primer

Gambar 2 menunjukkan bahwa bantuan pinjaman bergulir masyarakat yang antusias dapat mengembangkan usahanya. Masyarakat memiliki pekerjaan (berjualan). Selain itu, ditemukan kemudahan, antara lain tidak perlu memberikan jaminan, bunga terjangkau (1 s.d. 1.5%), dan kemudahan dari segi sistem kekeluargaan yang dibangun dalam program ini.

Selain itu, masih ditemukan KSM yang antre untuk mendapatkan pinjaman bergulir melalui PNPM. Hal ini menunjukkan bahwa Program Bantuan Pinjaman Bergulir diharapkan oleh masyarakat miskin dalam meningkatkan kegiatan produktif sehingga mampu mandiri dibidang ekonomi.

#### 4.2.3. Besarnya Dana yang Dipinjam Anggota KSM

Berdasarkan hasil survey tentang besar dana yang dipinjam anggota KSM dapat di lihat pada gambar 3.

**Gambar 3 Besarnya Dana Pinjaman dalam Program PNPM-MP**



Sumber: Data Primer

Gambar 3 menunjukkan bahwa masyarakat, dalam hal ini anggota KSM, menerima bantuan dana bergulir melalui program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan di Kota Surabaya sebesar Rp500.000,00—Rp2.500.000,00. masyarakat yang menerima pinjaman dana bergulir sebesar Rp. 500.000,00 karena kali pertama menggunakan pinjaman guliran pertama, yang sudah mulai guliran kedua dapat mencapai Rp1.000.000,00 atau ada yang sudah mendapatkan Rp1.500.000,00. Pelaksanaan program PNPM guliran pertama atau melalui Program P2KP ada yang mengalami hambatan namun ada juga yang maju pesat dan bahkan anggotanya bisa meminjam sampai Rp3.500.000,00.

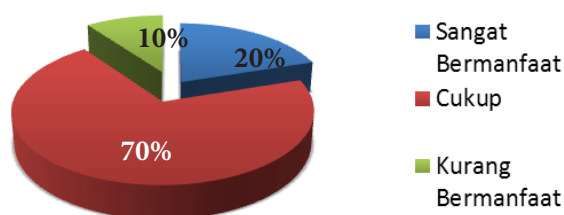
#### 4.2.4. Tingkat Kemanfaatan Bantuan Dana Bergulir

Jika dilihat dari tingkat manfaatnya, sebagian besar anggota KSM yang diwawancarai menjawab bahwa bantuan pinjaman bergulir sangat bermanfaat, dan sedikit anggota KSM yang merasa tidak begitu bermanfaat terhadap pengembangan usahanya. Hal ini diakui oleh anggota KSM bahwa dana yang dipinjamkan terlalu kecil, terutama bagi anggota KSM yang kali pertama mendapat pinjaman. Dana pinjaman sebesar Rp500.000,00 bila digunakan untuk usaha “pracangan” atau toko tidak cukup. Oleh sebab itu, masyarakat merasa bahwa pinjaman bergulir sebesar Rp500.000,00 atau Rp1000.000,00 tidak cukup bila dibandingkan dengan modal yang harus dikeluarkan untuk belanja barang dagangan yang akan dijual.

Gambar 4 menunjukkan hasil wawancara bahwa anggota KSM yang telah menerima bantuan modal dari dana bergulir ada peningkatan usahanya sekitar 20—30%. Namun, ada juga yang sudah meningkat lebih dari 100%, serta ada juga yang tetap tidak ada peningkatan. Beberapa KSM ada yang senang dengan program ini karena sebelum ada program PNPM Pinjaman Bergulir ini masyarakat pinjam di tetangga atau saudaranya sebelum ke pasar untuk

membeli dagangan dan dijual di pasar. Dengan demikian masyarakat yang meminjam uang harus segera mengembalikannya setelah pulang dari pasar.

**Gambar 4. Tingkat kemanfaatan Pinjaman Bergulir**

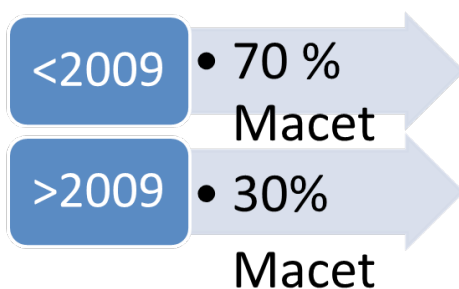


Sumber: Data Primer

#### 4.2.5. Pengembalian Dana Bergulir

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar anggota KSM mampu mengembalikan pinjaman dana bergulir, terutama bagi mereka yang mendapatkan pinjaman pada gulirat ke III (tahun 2009 keatas), walaupun ada yang terlambat. Keterlambatan pengembalian tersebut disebabkan oleh satu atau dua anggota yang terlambat mengangsur sehingga tidak tepat waktu atau tertunda, terutama pada hari lebaran dan hari menjelang pertama masuk sekolah setelah libur lama. Namun, kendala pengembalian uang dilakukan oleh masyarakat yang meminjam sebelum tahun 2009 atau pada waktu P2KP. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 5 berikut.

**Gambar 5. Tingkat Kelancaran Pengembalian Pinjaman Bergulir**

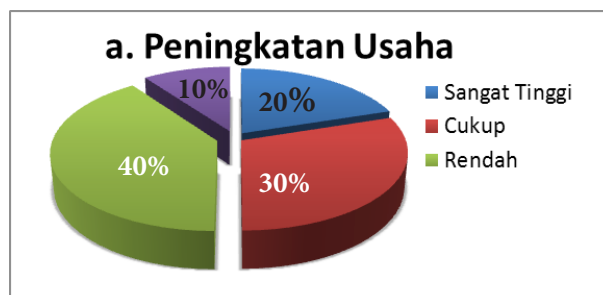


Sumber: Data Primer

#### 4.2.6. Dampak PNPM terhadap Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga

Program PNPM MP, melalui program bantuan pinjaman bergulir, dapat meningkatkan kesejahteraan Rumah tangga di Kota Surabaya. Dalam kajian ini, pengukuran kesejahteraan rumah tangga digunakan indikator kesejahteraan mikro menurut Rojas (2004) yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan dan tujuan program PNPM-MP di Kota Surabaya. Tujuan program tersebut adalah penambahan penghasilan yang diterima, peningkatan usaha yang dijalankan, peningkatan kualitas makan, dan kemampuan membiayai pendidikan anak-anaknya, serta kemampuan penerima untuk menabung akibat dari fasilitas bantuan pinjaman bergulir melalui Program PNPM MP.

**Gambar 5.5. Peningkatan Usaha Penerima Manfaat BLM**



Sumber: Data Primer

Hasil survei melalui wawancara seperti yang dapat dilihat pada gambar 5 menunjukkan bahwa pinjaman bergulir melalui Program PNPM MP terdapat peningkatan kesejahteraan rumah tangga responden yang besarnya bergantung pada lamanya menjadi anggota KSM dan menerima bantuan pinjaman bergulir melalui PNPM MP. Masyarakat yang sudah menerima sejak awal dan tidak mengalami kendala dapat menikmati peningkatan usaha dan ada yang peningkatannya mencapai 300% (sekitar 20% dari sampel responden). Namun, ada juga yang hanya mencapai sekitar 50% s.d. 100% dibandingkan awal mulai usaha tersebut. Berdasarkan hasil survei anggota KSM yang



memulai pinjam pada tahun 2009/2010 (sekitar 75%) telah berhasil meningkatkan usahanya sekitar 15%—30%.

usaha anggota KSM sesuai dengan lamanya sebagai penerima manfaat BLM dalam Program PNPM-MP di Kota Surabaya

Tabel 2 menunjukkan Kondisi Peningkatan

**Tabel 2. Peningkatan Usaha KSM Sesuai dengan Lamanya Penerima BLM**

UPP	Peningkatan	Prosentase
UPP2.1. 2007 S/d sekarang	Ada Peningkatan 15-30 % Belum ada Peningkatan	30% 70 %
UPP 1.2 2004	Ada Peningkatan 50 -100% Ada Peningkatan Sedikit (< 50%)	80 % 20 %
UPP 1.1.1999	Banyak Peningkatan >200% Meningkat ≤ 100% Tidak ada Sama sekali	10% 30% 60%

Sumber; Data Primer

Peningkatan usaha masyarakat berdampak pada peningkatan taraf kehidupan walaupun sedikit. Sekitar 60% dari anggota masyarakat yang biasanya selalu hutang ke tetangga atau keluarga menjadi lebih mandiri jika ada keperluan keuangan, dan sekitar 20% dari mereka telah mampu menabung di PKK, arisan dll.

Berdasarkan kualitas makan juga telah mengalami peningkatan. Sekitar 60% dari anggota masyarakat yang biasanya makan nasi dengan tempe menjadi makan nasi dengan telur, terkadang dengan ikan atau ayam.

## 5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analissi data sekunder dan survei di lapangan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Dana BLM PNPM MP Kota Surabaya disikapi dengan antusias oleh masyarakat untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, baik yang sudah memiliki usaha maupun yang baru mendirikan usaha.
2. Besar pinjaman bergulir yang dinikmati oleh setiap anggota KSM bervariasi sesuai dengan lamanya perguliran dana yang dilakukan, yaitu mulai dari Rp500.000,00 sampai dengan Rp2.750.000,00.

3. Tingkat kemanfaatan dana bergulir telah dirasakan manfaatnya bagi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat tidak melakukan pinjaman ke rentenir ataupun saudaranya untuk kebutuhan keuangan dalam kegiatan ekonomi.
4. Pinjaman Bergulir bisa meningkatkan usaha anggota KSM atau penerima manfaat dana sebesar 20—30% bagi yang baru meminjam mulai tahun 2009/2010. Tapi, masyarakat yang telah pinjam melalui Program P2KP sejak tahun 2000 telah memberikan peningkatan usaha sampai 300%.
5. Pengembalian Pinjaman Bergulir oleh KSM tergolong lancar mulai tahun 2009 keatas, tunggakan masih besar dikarenakan permasalahan tunggakan P2KP sejak tahun 2000.
6. Program P2KP mengalami tunggakan besar karena beberapa prosedur pencairan maupun penyaluran dana terhadap masyarakat kurang tepat dan tidak memenuhi persyaratan yang ada sehingga banyak diselewengkan. Selain itu, ada pula anggapan bahwa tersebut sebagai dana hibah yang tidak perlu dikembalikan.
7. Program pinjaman bergulir melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Surabaya telah memberikan dampak bagi kesejahteraan

rumah tangga miskin sekitar 10% s.d. 30%. Hal ini terindikasi dari anggota KSM yang merasakan teratasi kesulitan keuangan, adanya peningkatan usaha, peningkatan kualitas makan sehari-hari, dan bisa menabung untuk hari raya.

## 5.2. Implikasi

Hasil studi ini dapat dianggap sebagai pembuktian program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan langsung sebagai dana bergulir bagi usaha kecil rumah tangga. Dengan demikian, usaha kecil tersebut dapat meningkat sehingga jika diterapkan dengan sistem yang tepat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

## 5.3. Keterbatasan

Disadari bahwa penelitian belum mampu menampilkan semua variabel yang mungkin terkait dengan kemajuan usaha responden yang kemungkinan juga disebabkan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## 5.4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan di atas serta harapan dari kebanyakan responden setelah ditanya jawabannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Program Pinjaman PNPM-PN bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan Rumah Tangga miskin kota sehingga Program ini hendaknya tetap dilanjutkan
2. Pengendalian hendaknya dilakukan dari berbagai pihak (Pemerintah Kota Surabaya UPK, BKM/LKM Konsultan dan masyarakat secara terbuka, sehingga tidak akan terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan PNPM
3. Diperlukan peningkatan jumlah Pinjaman Bergulir diatas Satu Juta Rupiah atau minimum Rp. 1.500.000,-

Agar manfaat Dana Bergulir lebih besar dan tepat sasaran

4. PNPM MP seoptimal mungkin berkoordinasi lintas sector (Bapemas, Disperindag dan Dinas Koperasi, pendidikan dsb) karena masih ada beberapa program yang dilaksanakan dengan penerima manfaat yang sama.
5. Model Pemberdayaan Dana Bergulir yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan program namun perlu ditambahkan adanya pendampingan terhadap KSM dalam bentuk Penataan Manajemen Usaha seperti pengelolaan keuangan, akses pemasaran sehingga usaha menjadi lebih maju, dan angsuran pinjaman bergulir menjadi lancar serta kesejahteraan Rumah Tangga miskin menjadi meningkat.
6. Pinjaman Bergulir yang mengalami penunggakan diupayakan terus ditagih, peminjam harus mengangsur agar citra masyarakat terhadap Dana Bergulir melalui PNPM-MP ini tidak dianggap sebagai dana hibah.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arsyad, Lincolin (2004), *"Ekonomi Pembangunan"*, edisi ke 4, cetakan ke-2 Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (BPFE Unibraw), Malang
- Firman Akbar (2013) , *"Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone"* Jurnal.humaskabsragen.com 2013
- Hery Sinurat, (2012) *"Sinergitas Pemerintah Kota, BKM dan UPK dalam Peningkatan Kinerja Pinjaman Bergulir Kota Surabaya"*, Bahan Pelatihan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya.
- Yurnalis Ngayoh, 2010. *"Pengaruh Efektifitas*

- Kepemimpinan, Sumberdaya Ekonomi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Timur*". Unpublish material Disertais Program Pasca Sarjana Untag Surabaya
- Mohammad Rifky, (2012) "*Kondisi pengelolaan dana bergulir UPK BKM di Kota Surabaya*" Bahan Lokakarya PNPM-MP oleh Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pematusan Pemerintah Kota Surabaya
- Rofi' Munawar (2010)** *Mengevaluasi Program Mengatasi Kemiskinan Jawa Timur* Kompas Jumat, 07 September 2007
- Tri Widodo Utomo,. 1998, *Beberapa Permasalahan dan Upaya Akselerasi Program Pemberdayaan Masyarakat*. Capacity Building 1998 UNDP,
- Wikipedia Indonesia, *Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia*, (2004) "*Kemiskinan*" diambil dari <http://wiki/kemiskinan>, diakses tanggal 15 Juli 2006.
- .....(2010), *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya
- .....(2008), "*Efektifitas Program Pemberdayaan Usaha Pada Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin (Studi Kasus di Desa Wates dan Desa Bendo Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri)*" *Jurnalskripsi.com* di download pada tanggal 23 September 2013.
- .....(2013) "*Profil Kemeskinan di Indonesia Maret 2013*" Berita Resmi Badan Statistik Nasional No. 47/07/Th. XVI, 1 Juli 2013.
- .....(2012) "*Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Percepat Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*" [www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/](http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/) di download pada tanggal 23 September 2012.